

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, terdapat 64,2 juta UMKM di Indonesia yang telah menyumbangkan keterampilan yang mencakup 97% dari total angkatan kerja dan kemampuan subkontrak hingga 60,4 juta jiwa. %. Namun peningkatan jumlah UMKM di Indonesia juga bukan karena kurangnya usaha. Pertumbuhan UMKM yang relatif lambat memberikan harapan besar bagi perekonomian negara. Ini akan menjadi aset ekonomi yang kuat jika dijual dan diinvestasikan dengan uang. Provinsi Bali mencakup wilayah 5.636.66 km<sup>2</sup> - 0,29% luas wilayah Indonesia dan terbagi dalam sepuluh kota, yaitu Gianyar, Bangli, Tabanan, Karangasem, Klungkung, Jembrana, Badung, Denpasar, dan Buleleng. Di Provinsi Bali terdapat sejumlah 429.382 UMKM sesuai dengan informasi dari Operasional dan UMKM Provinsi Bali pada tahun 2023. Di bawah ini disajikan Tabel 1.1 yang menyajikan informasi keragaman UMKM secara terbatas pada Kabupaten dan Kota di Pulau Bali.

**Tabel 1. 1**

**Data Keragaman UMKM Bali Tahun 2022**

No.	Kabupaten/Kota	Sektor	Klasifikasi Jumlah	Transformasi Jumlah
1.	Badung	Perdagangan	10.068	21.699
2.	Bangli	Perdagangan	23.196	44.251
3.	Buleleng	Perdagangan	48.043	66.368
4.	Denpasar	Perdagangan	10.616	29.749
5.	Gianyar	Perdagangan	30.468	75.666
6.	Jembrana	Perdagangan	44.973	57.183
7.	Karangasem	Perdagangan	31.760	50.717

8.	Klungkung	Perdagangan	23.610	35.792
9	Tabanan	Perdagangan	26.144	47.957
	<b>Jumlah</b>		<b>248.875</b>	<b>429.382</b>

**Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan jumlah transformasi terkait di sektor perdagangan di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Bali ditunjukkan pada Tabel 1. Gianyar mengalami lebih banyak perubahan di sektor ini dibandingkan kota lain, namun Buleleng memiliki lebih banyak UMKM.

Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan transformasi terbanyak. Diberitahukan melalui [updatebali.com](https://updatebali.com) Kekayaan budaya dan alam Buleleng telah menjadikan kawasan ini memiliki reputasi sebagai pusat inovasi dan kreativitas. Oleh karena itu, transformasi UMKM Kabupaten Buleleng menduduki peringkat pertama di Provinsi Bali dan pertumbuhannya sangat signifikan. Berkat upaya UMKM, Buleleng mampu menjaga stabilitas relatif dalam menghadapi pandemi COVID-19, menurut sekretaris daerah kabupaten tersebut. Selain itu, industri pariwisata menyumbang sekitar 37% hingga 40% kontribusi ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng. Meski Buleleng tidak memiliki tingkat pariwisata seperti Bali Selatan, namun sektor ekonomi kreatif mempunyai peranan penting dalam menunjang perekonomian daerah. Elizabeth Tioria Gurning, Analis Kebijakan Ahli Menengah di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, membalas dengan mengatakan bahwa negara ini terkenal dengan 17 sub-sektor ekonomi kreatif yang berbeda. Rombongan mengunjungi Buleleng dan berinteraksi dengan para pelaku kreatif di bidang memasak, teater, fashion, dan musik (<https://updatebali.com/>) Tim perlu menentukan sub-sektor mana yang menunjukkan daya cipta paling tinggi, karena temuan kunjungan tersebut

menunjukkan bahwa semua sub-sektor tersebut memiliki masa depan yang menjanjikan.

Sebanyak 45,71 persen penduduk di Kabupaten Buleleng melaporkan kesulitan mendapatkan pinjaman. Meski demikian, 71,4% UMKM di Kabupaten Buleleng melaporkan kesulitan mendapatkan akses permodalan pasca COVID-19. Kesulitan permodalan UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan sebesar 25,7%, demikian kesimpulan yang dapat diambil. Situs resmi <https://balitbang.bulelengkab.go.id> menyajikan data kesulitan akses permodalan.

Kabupaten Buleleng merupakan wilayah kedua terpadat dan menjanjikan secara ekonomi di Kabupaten Buleleng, tepat setelah Kecamatan Gerokgak. Hal ini dikuatkan dengan data-data yang tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 1. 2**  
**Rekap Jumlah Penerbitan IUMK Tahun 2019 s/d 2022 Per Kecamatan**

Kecamatan	Jumlah
Buleleng	634
Gerokgak	977
Burungbiu	282
Sukasada	347
Seririt	233
Tejakula	442
Banjar	259
Sawan	302
Kubutambahan	169

**Sumber: Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UMKM Kabupaten Buleleng**

Kabupaten Buleleng menerbitkan IUMK terbanyak kedua setelah Gerokgak. Kabupaten Buleleng merupakan sentralisasi kota. Segala kegiatan usaha dan UMKM di Kabupaten Buleleng berkembang pesat. Perkembangan UMKM di

Kabupaten Buleleng diawasi dengan ketat karena banyak kegiatan yang dilakukan, termasuk mempromosikan UMKM melalui pameran dan festival budaya (Vijaya, D., & Irwansyah, 2017). Pergerakan penduduk di Kabupaten Buleleng membantu tumbuhnya usaha kecil dan menunjang perekonomian. Kabupaten Buleleng memiliki mobilitas penduduk tertinggi di kecamatannya menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain menjadi pusat kota, Kabupaten Buleleng mempunyai jumlah penduduk terbanyak dari 8 kecamatannya. Hal ini semakin memperkuat pilihan Kabupaten Buleleng sebagai lokasi penelitian karena segala kegiatan usaha dan UMKM berkembang pesat di sana. UMKM di Kabupaten Buleleng diawasi secara ketat. Pameran dan festival budaya yang dilakukan secara rutin dapat memberikan peluang penelitian bagi UMKM untuk berkembang.

Izin IUMK menjadi tolok ukur bagi UMKM di Kabupaten Buleleng. Pembangunan terjadi ketika UMKM tumbuh berdasar ukuran, penerimaan, aset, dan lainnya. UMKM kesulitan mendapatkan modal dan pembiayaan, yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Sesuai dengan keterangan dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng (2023), UMKM lokal sudah banyak yang menerima bantuan berupa BLT namun ada pula pengusaha yang belum. Di Kabupaten Buleleng masih banyak pelaku UMKM yang belum menerima bantuan BLT. Dari 7.397 UMKM di Kabupaten Buleleng, baru 4.278 yang terdaftar menerima bantuan BLT. (<https://bulelengkab.go.id/>).

Ketidakmampuan untuk mendapatkan pendanaan yang memadai untuk mempertahankan pertumbuhan dan operasional perusahaan merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun

UMKM dapat memperoleh manfaat dari bantuan langsung tunai (BLT), ketimpangan modal dapat terjadi jika hanya sebagian kecil UMKM yang benar-benar menerimanya. Akses keuangan seseorang, keluarga, atau perusahaan dapat didefinisikan sebagai kemudahan mereka dalam menggunakan berbagai layanan dan produk keuangan. Usaha kecil dan menengah (UKM) seringkali membutuhkan pendanaan tambahan untuk tumbuh, memperoleh mesin baru, menciptakan barang baru, atau memasuki pasar yang belum dimanfaatkan. Di sisi lain, terdapat hambatan yang membuat UMKM kesulitan mendapatkan produk jasa keuangan. Hal ini disebabkan karena bank memiliki standar tinggi yang tidak selalu mudah untuk dipenuhi, beberapa bank terlalu pilih-pilih dalam memilih siapa yang akan bekerja sama, dan beberapa bank mempunyai sikap negatif terhadap nasabah kelas bawah. (<https://blog.mekar.id/>). Kemampuan untuk mengakses pinjaman dan modal ventura dengan mudah sangat penting bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berkembang sehingga proses operasionalnya dapat berjalan secara efisien ketika mereka memiliki akses terhadap pembiayaan yang cukup untuk membeli bahan baku dan inventaris yang mereka butuhkan. Penawaran dan produksi produk atau jasa dapat meningkat sebagai akibat dari hal ini. Pertumbuhan UMKM mendapat pengaruh positif dari adanya akses keuangan di Kota Semarang, menurut penelitian (Aqida & Fitria, 2019)..

Ada korelasi kuat antara gagasan modal finansial dan permasalahan modal yang berkembang. Dana yang digunakan untuk tujuan komersial atau investasi dikenal sebagai modal finansial. Permasalahan permodalan membuat UMKM sulit mendapatkan dan memanfaatkan modal finansial dengan baik. Pinjaman dan bentuk pembiayaan lain dari bank dan organisasi pemberi pinjaman lainnya

merupakan strategi umum untuk mengatasi masalah arus kas. Meminjam uang dari lembaga keuangan berpotensi memberikan peluang bagi UMKM untuk berekspansi, membeli inventaris, atau menciptakan produk baru. Di sektor bisnis dan keuangan, digunakan jenis modal yang disebut modal keuangan. Modal didefinisikan sebagai uang yang dapat diakses untuk digunakan dalam investasi, menjalankan bisnis, atau sejumlah kegiatan ekonomi lainnya. Modal dengan komponen keuangan mencakup uang, investasi, dan aset keuangan lainnya yang digunakan dalam perekonomian. Menurut penelitian, modal finansial berpengaruh terhadap perluasan UMKM (Marija et al., 2021). Dibandingkan dengan korporasi besar, UMKM dapat berkembang dan berkembang lebih cepat dan berkelanjutan. Untuk membantu UMKM mendapatkan pendanaan untuk keperluan ekspansi, lembaga keuangan, investor, dan program dukungan UMKM memainkan peran penting.

Untuk membantu UMKM berkembang, pemerintah menyalurkan BLT. Infrastruktur Pusat Layanan Bisnis Terpadu adalah kebijakan lainnya. Karena pemerintah mengatur kegiatan masyarakat, maka dapat membuat peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi masyarakat. UMKM membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi, pemasaran, dan keuangan (Hadiyati & Mulyono, 2017). Tantangan yang dihadapi oleh beberapa UMKM seperti tidak memiliki lokasi tetap dan status hukum. Dukungan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. UMKM dapat kesulitan untuk tumbuh dan berkinerja ketika menghadapi tantangan. Lingkungan eksternal makro dan mikro mempengaruhi kinerja bisnis. UMKM berinteraksi dengan pemasok, konsumen, agen penjualan, instansi pemerintah, dan pesaing. Iklim makroekonomi yang dikelola dengan baik,

stabil, dan dapat diprediksi membantu pertumbuhan usaha kecil dan mikro (Hadiyati & Mulyono, 2017). Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mempengaruhi pertumbuhan UMKM. (Pramestiningrum & Iramani, 2020).

Dengan adanya penelitian ini, dilaksanakan investigasi empiris menyangkut hubungan antara perluasan UMKM di Kecamatan Buleleng dan faktor-faktor meliputi kebijakan pemerintah, permodalan keuangan, dan akses terhadap kredit. Berbagai penelitian menunjukkan hasil yang bertentangan ketika mengkaji hubungan antara akses keuangan dan perluasan UMKM. Akses keuangan berhubungan positif dengan perluasan UMKM (Aqida & Fitria, 2019). Namun Sibanda dan Shava (2017) menemukan bahwa terdapat korelasi terbalik yang kuat antara akses keuangan dan ekspansi UMKM. Berbagai penelitian menunjukkan hasil yang bertentangan ketika mengkaji hubungan antara akses keuangan dan perluasan UMKM. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Anjelia, 2023) menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan dalam statistik pada modal keuangan dan perluasan UMKM. Maulatuzulfa (2022) menemukan adanya korelasi negatif antara modal finansial dengan pertumbuhan UMKM. Penelitian oleh Purwaningsih & Haryono (2019) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak mempengaruhi perluasan UMKM. Namun Purwaningsih dan Kusuma (2018) menemukan bahwa kebijakan pemerintah dan pembiayaan UMKM dapat meningkatkan kinerja usaha secara signifikan.

Oleh karena itu, atas permasalahan di atas maka diangkat judul **“Pengaruh Akses Keuangan, Modal Keuangan, dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Terdapat permasalahan yang teridentifikasi berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, yakni:

1. Kesulitan mendapatkan akses terhadap layanan keuangan, karena UMKM menghadapi persyaratan perbankan yang rumit serta seringkali tidak terpenuhi, praktik pemilihan nasabah yang terlalu selektif, dan sikap negatif terhadap nasabah kelas bawah.
2. Terdapat korelasi yang kuat antara gagasan Modal Finansial dengan tantangan permodalan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Buleleng. Dana yang digunakan untuk tujuan komersial atau investasi dikenal sebagai modal finansial. Ketika uang terbatas, sulit untuk mendapatkannya dan memanfaatkannya dengan baik.
3. Pertumbuhan UMKM dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang mengatur penerbitan IUMK, bantuan langsung tunai (BLT), dan bentuk dukungan lainnya. Mengevaluasi seberapa baik kebijakan pemerintah mendorong perluasan UMKM merupakan suatu hal yang penting.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Fokus pada penelitian, yakni dampak kebijakan pemerintah, permodalan keuangan, dan akses pembiayaan terhadap pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang berusaha untuk dipecahkan dalam penelitian ini, yakni:

1. Seberapa besar pengaruh akses keuangan terhadap pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng?
2. Seberapa besar pengaruh modal keuangan terhadap pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng?
3. Seberapa besar pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini memiliki tujuan yang diharapkan, yakni:

1. Untuk menganalisis pengaruh akses keuangan terhadap pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng.
2. Untuk menganalisis pengaruh modal keuangan terhadap pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng.
3. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng.

#### **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat atas hasil penelitian yang nanti diperoleh diharapkan dapat berdampak baik bagi berbagai pihak.

## 1. Manfaat Teoritis

Terjadi peningkatan pemahaman teoritis dan pengetahuan tentang pengembangan UMKM khususnya di Kabupaten Buleleng. Hal ini akan dicapai dengan mengkaji dampak akses keuangan, modal keuangan, dan kebijakan pemerintah. Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber berharga untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja keuangan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. UMKM

Memberikan wawasan berharga kepada UMKM di Kabupaten Buleleng mengenai dampak akses keuangan, modal keuangan, dan kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan mereka.

### b. Pembaca

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menyediakan sumber daya berharga untuk penelitian masa depan di bidang yang sama. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang bagaimana akses keuangan, permodalan keuangan, dan kebijakan pemerintah berdampak pada pertumbuhan UMKM..